

Judul : Anggaran pendidikan naik, legislator usul biaya SD-SMP swasta gratis
Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anggaran Pendidikan Naik Legislator Usul Biaya SD-SMP Swasta Gratis

FOTO: DPR.CO.ID



Abdul Fikri Faqih

ANGGOTA Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyoroti kenaikan anggaran pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Diharapkan, anggaran itu untuk menggratiskan seluruh biaya tingkat SD dan SMP. Langkah itu juga untuk me melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pendidikan dasar gratis.

Berdasarkan struktur RAPBN 2027, alokasi wajib anggaran sektor pendidikan sebesar 20 persen mengalami peningkatan signifikan. Angkanya naik dari Rp 768,54 triliun jadi Rp 820,9 triliun. Kenaikan itu seiring dengan proyeksi kenaikan penerimaan negara dari Rp 3.842,7 triliun menjadi Rp 4.092,2 triliun.

Fikri menegaskan, Komisi X DPR berkomitmen mengawal kenaikan alokasi anggaran itu. Pengawasan penuh dilakukan agar kenaikan tidak sekadar berakhir sebagai peningkatan nominal di atas kertas. "Kenaikan ini wajib memberikan manfaat nyata bagi pemerataan layanan pendidikan masyarakat luas," tegasnya, Selasa (18/8/2026).

Dia lalu menyoroti fokus Pemerintah yang dinilai masih menitikberatkan pada perbaikan fisik bangunan sekolah. Menurutnya, daripada sekadar terus melakukan perbaikan sarana maupun prasarana sekolah di berbagai wilayah, Pemerintah bisa mengutamakan pemenuhan hak dasar seluruh warga dalam sektor pendidikan.

Dia bilang, implementasi putusan MK mengenai pelaksanaan pendidikan dasar gratis didorong agar segera dijalankan secara bertahap, dengan menggunakan postur anggaran baru. Makanya, program menggratiskan sekolah SD hingga SMP perlu disimulasikan sekaligus di realisasikan dengan tepat, meski MK tidak menentukan batasan tahun pelaksanaan secara pasti.

Sebagai langkah ke depan, Komisi X DPR berjanji mencermati penyebaran alokasi anggaran pendidikan yang terbagi pada berbagai kementerian, lembaga, serta transfer ke daerah. Pengawasan ketat itu diharapkan menjamin efektivitas penggunaan dana. "Ini demi tercapainya peningkatan kualitas SDM secara nasional," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayanti menambahkan, Anggaran Pendidikan 2027 diharapkan bisa diarahkan menyelesaikan berbagai persoalan mendasar. Pemerintah perlu memprioritaskan alokasi dana untuk peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, kebutuhan sekolah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga pemenuhan hak pendidikan dasar.

Esti bilang, alokasi dana itu semestinya mampu menjawab berbagai pekerjaan rumah sektor pendidikan yang belum terselesaikan sejak tahun lalu. "Berbagai persoalan honor gaji guru, fasilitas pendidikan kawasan 3T, sekolah rusak, hingga penanganan cepat bagi wilayah terdampak bencana harus diselesaikan secara baik dan menyeluruh," terangnya.

Selanjutnya, persoalan besar yang dihadapi bukan hanya terkait putusan MK agar anggaran pendidikan tidak digunakan untuk kegiatan lain pada 2028. Karena anggaran pendidikan juga memiliki tugas besar lainnya. Diketahui, sesuai putusan MK anggaran juga digunakan untuk membiayai program pendidikan gratis mulai dari jenjang SD hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. ■ PYB